

LAPORAN KEUANGAN
UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BA.018.05.2100.567717
SEMESTER II
TAHUN ANGGARAN 2017

Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2017



Jln . PERTANIAN PASSO AMBON

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas / pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Ambon, 31 Desember 2017
Kuasa Pengguna Anggaran,

Ir. AZWIN AMIR MM
NIP. 196011301981031002

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Telah Direviu

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

I Laporan Realisasi Anggaran

II Neraca

III Laporan Operasional

IV Laporan Perubahan Ekuitas

V Catatan atas Laporan Keuangan

A Penjelasan Umum

B Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

B.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak

B.2 Belanja Pegawai

B.3 Belanja Barang

B.4 Belanja Modal

B.4.1 Belanja Modal Tanah

B.4.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

B.4.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

B.4.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

C Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1 Aset Lancar

C.2 Aset Tetap

C.2.1 Tanah

C.2.2 Peralatan dan Mesin

C.2.3 Gedung dan Bangunan

C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

C.2.5 Aset Tetap Lainnya

C.2.6 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

C.3 Aset Lainnya

C.3.1 Aset Lain-lain

C.3.2 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

- C.4 Kewajiban Jangka Pendek
- C.5 Ekuitas
 - C.5.1 Ekuitas
- D Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional
 - D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
 - D.2 Beban Pegawai
 - D.3 Beban Barang dan Jasa
 - D.4 Beban Pemeliharaan
 - D.5 Beban Perjalanan Dinas
 - D.6 Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
 - D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi
 - D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
 - D.9 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
- E Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - E.1 Ekuitas Awal
 - E.2 Surplus/Defisit-LO
 - E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
 - E.4 Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas
 - E.4.1 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi
 - E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan
 - E.4.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap
 - E.5 Transaksi Antar Entitas
 - E.5.1 Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)
 - E.6 Ekuitas Akhir
- F Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
 - F.1 Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
 - F.2 Pengungkapan Lain-lain

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Ambon, 31 Desember 2017
Kuasa Pengguna Anggaran,

Ir. AZWIN AMIR MM
NIP. 196011301981031002

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon Tahun 2017 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2017 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 81.064.037,00 atau mencapai 14,66% dari estimasi Pendapatan - LRA sebesar Rp. 54.900.000,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2017 adalah sebesar Rp.14.471.201.093,00 atau mencapai 95,56% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 15.144.431.000,00

II Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2017.

Nilai Aset per 31 Desember 2017 dicatat dan disajikan sebesar Rp.37.564.713.324,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp.0,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp.37.564.713.324,00. Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp. 0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp. 0,00

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 37.564.713.324,00

III Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.47.154.136,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp 15.538.106.115,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp.-15.490.951.979,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos - Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Defisit Rp -359.542.946,00 dan Defisit Rp. 0,00 sehingga entitas mengalami Defisit - LO sebesar Rp -15.850.494.925,00.

IV Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2017 adalah sebesar Rp.19.148.017.433,00 ditambah Defisit - LO sebesar Rp-15.850.494.925,00 kemudian ditambah / dikurangi dengan koreksi - koreksi senilai Rp. 19.877.053.760,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 14.390.137.056,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2017 adalah senilai Rp 39.045.451.021,00.

V Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2017 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2017 dan 31 DESEMBER 2016**

Uraian	Catatan	31 Desember 2017			31 Desember 2016
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	54.900.000,00	81,064.037,00	147,66	101.505.313,00
Jumlah Pendapatan		54.900.000,00	81.064.037,00	147,66	101.505.313,00
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.2	9.033.267.000,00	8.493.219.416,00	94,02	8.577.496.048,00
Belanja Barang	B.3	4.951.164.000,00	4.828.781.677,00	97,53	10.488.820.433,00
Belanja Modal	B.4	1.160.000.000,00	1.149.200.000,00	99,07	2.778.376.400,00
Jumlah Belanja		15.144.431.000,00	14.471.201.093,00	95,56	21.844.692.881,00

II. NERACA

**Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon
NERACA
PER 31 DESEMBER 2017 dan 31 DESEMBER 2016**

Uraian	Catatan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
ASET			
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1	15.066.718.000,00	0,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2	28.597.622.889,00	28.718.365.299,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3	19.887.091.423,00	15.069.599.283,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4	327.016.800,00	292.016.800,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	11.000.000,00	11.000.000,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	C.2.6	-23.506.810.632,00	-22.371.404.525,00
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	C.2.6	-2.796.533.088,00	-2.558.439.554,00
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.6	-21.392.068,00	-13.119.870,00
Jumlah Aset Tetap		37.564.713.324,00	19.148.017.433,00
Jumlah Aset		37.564.713.324,00	19.148.017.433,00
Ekuitas			
Ekuitas	C.5.1	20.628.755.130,00	19.148.017.433,00
Jumlah Ekuitas		20.628.755.130,00	19.148.017.433,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		20.628.755.130,00	19.148.017.433,00

III. LAPORAN OPERASIONAL

**Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 dan 31 DESEMBER 2016**

Uraian	Catatan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	47.154.136,00	46.522.940,00
JUMLAH PENDAPATAN		47.154.136,00	46.522.940,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	8.493.219.416,00	8.577.496.048,00
Beban Barang dan Jasa	D.3	2.320.407.247,00	3.131.009.750,00
Beban Pemeliharaan	D.4	446.939.950,00	840.679.780,00
Beban Perjalanan Dinas	D.5	2.032.286.480,00	5.414.438.903,00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.6	30.000.000,00	1.102.692.000,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	2.215.253.022,00	2.407.581.504,00
JUMLAH BEBAN		15.538.106.115,00	21.473.897.985,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-15.490.951.979,00	-21.427.375.045,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.9	6.400.000,00	0,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.9	393.452.847,00	0,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9	27.509.901,00	54,982,373,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-359.542.946,00	54.982.373,00
SURPLUS/DEFISIT - LO		-15.850.494.925,00	-21.372.392.672,00

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 dan 31 DESEMBER 2016

Uraian	Catatan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
EKUITAS AWAL	E.1	19.148.017.433,00	18.767.130.776,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	-15.850.494.925,00	-21.372.392.672,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3	0,00	0,00
KOREKSI YANG MENAMBAH / MENGURANGI EKUITAS	E.4		
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.4.1	1.160.941,00	10.091.761,00
Koreksi Nilai Persediaan	E.4.2	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.4.3	19.875.892.819,00	
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	14.390.137.056,00	-21.743.187.568,00
EKUITAS AKHIR		39.045.451.021,00	19.148.017.433,00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon

Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mencapai swasembada pangan berkelanjutan.

Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon adalah merupakan salah satu UPT Pusat Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas, pokok dan fungsi berdasarkan Permentan Nomor 10/ Permentan / OT.140 / 2 / 2008. Kantor Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. berkedudukan di Jalan Pertanian Passo – Ambon.

Kantor Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Kantor Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon berkomitmen dengan visi “ ***Menjadi balai acuan yang profesional dalam pelayanan kepada masyarakat di bidang perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan*** ”.

Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut :

Misi Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon

adalah :

- 1) Mengoptimalkan pengawasan pelestarian plasma nutfah nasional sebagai sumber genetik dalam rangka penemuan varietas benih unggul dan pemanfaatan agens pengendali hayati;
- 2) Mengoptimalkan pengawasan mutu benih dan peredarannya serta pemanfaatan agens pengendali hayati;
- 3) Meningkatkan pelaksanaan uji adaptasi dan observasi dalam rangka pencarian dan pelepasan varietas serta pemanfaatan agens pengendali hayati;
- 4) Meningkatkan dan mengembangkan metode pengawasan mutu benih dan penerapan PHT;
- 5) Mengembangkan teknik identifikasi dan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
- 6) Mengoptimalkan pengendalian OPT, Penanggulangan Gangguan Usaha Perkebunan dan Dampak Anomali Iklim;
- 7) Meningkatkan pelayanan teknis pengawasan mutu benih dan proteksi tanaman perkebunan;
- 8) Meningkatkan pengembangan jaringan dan kerjasama antar laboratorium pengujian mutu benih dan proteksi.

Tujuan

Dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas tanaman dan mutu produk perkebunan yang berdaya saing tinggi, maka tujuan penyelenggaraan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon sebagai berikut :

- 1) Membangun kerjasama dengan pihak terkait dalam pengawasan mutu benih dan peredarannya serta pemanfaatan agens pengendali hayati dalam penerapan PHT.
- 2) Mengembangkan metode uji adaptasi dan observasi pencarian dan pelepasan varietas, pengujian mutu benih dan teknik pengendalian OPT spesifik lokasi yang berwawasan lingkungan.
- 3) Mengembangkan jejaring dan kerjasama antara laboratorium pengujian mutu benih dan proteksi.

Sasaran

Output atau sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan adalah :

- 1) Terlaksananya pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan.
- 2) Terlaksananya penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan
- 3) Terlaksananya pelayanan organisasi yang berkualitas.

Kantor Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon mempunyai tugas dan fungsi adalah melaksanakan pengawasan, pengembangan pengujian mutu benih, dan analisis teknis dan pengembangan proteksi tanaman perkebunan, serta pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan laboratorium. Dalam melaksanakan tugas di atas.

Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon menyelenggarakan **fungsi** :

- a. Pengawasan pelestarian plasma nutfah tingkat nasional;
- b. Pelaksanaan *pengujian mutu benih* perkebunan introduksi, eks impor, dan yang akan di ekspor, serta rekayasa genetika;
- c. Pelaksanaan *pengujian adaptasi* (observasi) benih perkebunan dalam rangka *pelepasan* varietas;
- d. Pelaksanaan *penilaian pengujian manfaat dan kelayakan* benih perkebunan dalam rangka *penarikan* varietas;
- e. Pelaksanaan *pengujian mutu dan sertifikasi* benih perkebunan dalam rangka *pemberian sertifikasi* layak edar;
- f. Pelaksanaan *pemantauan* benih perkebunan yang beredar lintas provinsi;
- g. Pelaksanaan *pengembangan teknik dan metode pengujian mutu* benih perkebunan dan *uji acuan (referee test)*;
- h. Pelaksanaan identifikasi organisme pengganggu tumbuhan (OPT) perkebunan;
- i. Pelaksanaan analisis data serangan dan perkembangan situasi OPT serta faktor yang mempengaruhi;
- j. Pelaksanaan analisis data gangguan usaha perkebunan dan dampak anomali iklim serta faktor yang mempengaruhi;
- k. Pengembangan teknik *surveillance* OPT penting;
- l. Pelaksanaan pengembangan metode pengamatan, model peramalan, taksasi kehilangan hasil, dan teknik pengendalian OPT perkebunan;
- m. Pelaksanaan eksplorasi dan inventarisasi musuh alami OPT Perkebunan;
- n. Pelaksanaan pengembangan teknologi perbanyakan, penilaian kualitas, pelepasan dan evaluasi agens hayati OPT perkebunan;
- o. Pelaksanaan pengembangan teknologi proteksi perkebunan yang berorientasi pada implementasi pengendalian hama terpadu;

- p. Pelaksanaan pengujian dan pemanfaatan pestisida nabati;
- q. Pemberian pelayanan teknik kegiatan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;
- r. Pengelolaan data dan informasi kegiatan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;
- s. Pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan manajemen laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;
- t. Pelaksanaan pengembangan jaringan dan kerjasama laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;
- u. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga Balai .

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2017 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2017 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon adalah sebagai berikut :

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD .

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut ;

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 Tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 Tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan .
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan .

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap , dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas} bulan , aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi .
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, BBP2TP AMBON telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	12.100.000,00	12.100.000,00
Pendapatan Jasa	42.800.000,00	42.800.000,00
Jumlah Pendapatan	54.900.000,00	54.900.000,00
Belanja		
Belanja Pegawai	9.033.267.000,00	9.033.267.000,00
Belanja Barang	4.701.164.000,00	4.951.164.000,00
Belanja Modal	1.160.000.000,00	1.160.000.000,00
Jumlah Belanja	14.894.431.000,00	15.144.431.000,00

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.81.064.037,00 atau mencapai 147,66% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.54.900.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2017		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Pendapatan			
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	12.100.000,00	9.130.000,00	75,46
Pendapatan Jasa	42.800.000,00	44.424.136,00	103,80
Pendapatan luran dan Denda	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lain-lain	0,00	27.509.901,00	000
Jumlah	54.900.000,00	81,064,037,00	147,66

Realisasi Pendapatan TA 2017 mengalami penurunan sebesar -20,14% dibandingkan TA 2016. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	.%
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	9.130.000,00	8.324.000,00	9,68
Pendapatan Jasa	44.424.136,00	36.092.238,00	23,09
Pendapatan luran dan Denda	0,00	2.106.702,00	-100,00
Pendapatan Lain-lain	27.509,901,00	54.982.373,00	-49,97
Jumlah	81.064.037,00	101.505.313,00	-20,14

Realisasi Belanja pada TA 2017 adalah sebesar Rp14.471.201.093,00 atau 95,56% dari anggaran belanja sebesar Rp15.144.431.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2017

Uraian	2017		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Belanja			
Belanja Pegawai	9.033.267.000,00	8.494.314.416,00	94.03
Belanja Barang	4.951.164.000,00	4.828.781.677,00	97.53
Belanja Modal	1.160.000.000,00	1.149.200.000,00	99.07
Total Belanja Kotor	15.144.431.000,00	14.472.296.093,00	95.56
Pengembalian Belanja		-1,095.000,00	0.00
Total Belanja	15.144.431.000,00	14.471.201.093,00	95.56

Dibandingkan dengan Tahun 2016, Realisasi Belanja TA 2017 mengalami penurunan sebesar -33.75% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	.%
Belanja Pegawai	8.493.219.416,00	8.577.496.048,00	-0,98
Belanja Barang	4.828.781.677,00	10.488.820.433,00	-53,96
Belanja Modal	1.149.200.000,00	2.778.376.400,00	-58,64
Total Belanja	14,471,201,093.00	21,844,692,881.00	-33,75

B.2 BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 8.493.219.416,00 dan Rp 8.577.496.048,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2017 mengalami penurunan sebesar -0,98% dari TA 2016.

Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	8.472.908.416,00	8.485.924.160,00	-0.15
Belanja Lembur	21.406.000,00	91.572.000,00	-76.62
Jumlah Belanja Kotor	8.494.314.416,00	8.577.496.160,00	-0.97
Pengembalian Belanja Pegawai	-1.095.000,00	-112,00	977.578,57
Jumlah Belanja	8.493.219.416,00	8.577.496.048,00	-0.98

B.3 BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.4.828.781.677,00 dan Rp.10.488.820.433,00. Realisasi belanja barang TA 2017 mengalami penurunan sebesar -53.96% dari TA 2016.

Perbandingan Belanja Barang
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	822.319.300,00	1.043.531.300,00	-21,20
Belanja Barang Non Operasional	741.511.447,00	1.676.951.700,00	-55,78
Belanja Jasa	755.724.500,00	433.183.250,00	74,46
Belanja Pemeliharaan	446.939.950,00	840.679.780,00	-46,84
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2.032.286.480,00	5.417.858.903,00	-62,49
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	30.000.000,00	1.102.692.000,00	-97,28
Jumlah Belanja Kotor	4.828.781.677,00	10.514.896.933,00	-54,08
Pengembalian Belanja Barang	0,00	-26.076.500,00	-100,00
Jumlah Belanja	4.828.781.677,00	10.488.820.433,00	-53,96

B.4 BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.1.149.200.000,00 dan Rp.2.778.376.400,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2017 mengalami penurunan sebesar -58.64% dibandingkan TA 2016.

Perbandingan Belanja Modal
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0,00	11.000.000,00	-100,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	949.700.000,00	1.007.296.400,00	-5,72
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	164.500.000,00	1.560.130.000,00	-89,46
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	35.000.000,00	199.950.000,00	-82,50
Jumlah Belanja Kotor	1.149.200.000,00	2.778.376.400,00	-58,64
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	1.149.200.000,00	2.778.376.400,00	-58,64

B.4.2 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.949.700.000,00 dan Rp1.007.296.400,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2017 mengalami penurunan sebesar -5,72% dibandingkan TA 2016.

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	949.700.000,00	1.007.296.400,00	-5,72
Jumlah Belanja Kotor	949.700.000,00	1.007.296.400,00	-5,72
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	949.700.000,00	1.007.296.400,00	-5,72

B.4.3 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.164.500.000,00 dan Rp1.560.130.000,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2017 mengalami penurunan sebesar -89,46% dibandingkan TA 2016.

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	164.500.000,00	1.560.130.000,00	-89,46
Jumlah Belanja Kotor	164.500.000,00	1.560.130.000,00	-89,46
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	164.500.000,00	1.560.130.000,00	-89,46

B.4.4 BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 35.000.000,00 dan Rp199.950.000,00. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2017 mengalami penurunan sebesar -82,50% dibandingkan TA 2016.

Perbandingan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	35.000.000,00	199.950.000,00	-82,50
Jumlah Belanja Kotor	35.000.000,00	199.950.000,00	-82,50
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	35.000.000,00	199.950.000,00	-82,50

C PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.2 ASET TETAP

C.2.1 TANAH

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.15.066.71.000,00 dan Rp.0,00.

C.2.2 PERALATAN DAN MESIN

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp28.597.622.889,00 dan Rp28.718.365.299,00.

C.2.3 GEDUNG DAN BANGUNAN

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.19.887.091.423,00 dan Rp.15.069.599.283,00.

C.2.4 JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.327.016.800,00 dan Rp.292.016.800,00.

C.2.5 ASET TETAP LAINNYA

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp11.000.000,00 dan Rp11.000.000,00.

C.2.6 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp-26.324.735.788,00 dan Rp-24.942.963.949,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	28.597.622.889,00	-23.506.810.632,00	5.090.812.257,00
2.	Gedung dan Bangunan	19.887.091.423,00	-2.796.533.088,00	17.090.558.335,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	327.016.800,00	-21.392.068,00	305.624.732,00
4.	Aset Tetap Lainnya	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
Akumulasi Penyusutan		48.822.731.112,00	-26.324.735.788,00	22.497.995.324,00

C.3 ASET LAINNYA

C.3.1 ASET LAIN-LAIN

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp36.362.100,00 dan Rp36.362.100,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon serta dalam proses penghapusan dari BMN.

C.3.2 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp-36.362.100,00 dan Rp-36.362.100,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2017, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Lain-lain	36,362,100.00	-36.362.100,00	0.00
	Akumulasi Penyusutan	36,362,100.00	-36.362.100,00	0.00

C.5 EKUITAS

C.5.1 EKUITAS

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 19.148.017.433,00 dan Rp20.628.755.130,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

• Pemesanan Bb dan APH Metarizium	senilai Rp.	420.000,00
• Uji Mutu APH	senilai Rp.	125.000,00
• Pemeriksaan Lapangan (cengkeh)	senilai Rp.	1.652.873,00
• Sertifikasi Benih Pala	senilai Rp.	15.000.000,00
• Sewa Asrama Selama 5 Hari Untuk 2 Orang	senilai Rp.	500.000,00
• Sewa Asrama Selama 2 Hari Untuk 2 Orang	senilai Rp.	200.000,00
• Kelompok Tani Sari Gula	senilai Rp.	160.000,00
• Kelompok Tani Jati Luhur	senilai Rp.	160.000,00
• Sewa Asrama Selama 20 Hari	senilai Rp.	1 000.000,00
• Sertifikasi Benih Pala	senilai Rp.	7.200.000,00
• Sewa Asrama	senilai Rp.	980.000,00
• Sertifikasi Benih Pala di Kec. Kairatu	senilai Rp.	630.100,00
• Sertifikasi Benih Cengkeh	senilai Rp.	50.000,00
• Uji Mutu Jamur Bb	senilai Rp.	250.000,00
• Uji Mutu Trichoderma	senilai Rp.	300.000,00
• Uji Mutu Jamur Metarizium	senilai Rp.	250.000,00
• Sertifikasi Benih Pala	senilai Rp.	50.000,00
• Uji Mutu Jamur Trichoderma	senilai Rp.	375.000,00
• Pemeriksaan Bibit	senilai Rp.	263,00
• Sertifikasi Benih Pala	senilai Rp.	3.500,00
• Sertifikasi Benih Pala	senilai Rp.	100.000,00

Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan senilai Rp. 2.730.000,00 adalah terdiri dari :

- Pembelian Jamur Tricoderma 1 testube senilai Rp. 35.000,00
- Jenis Tabung Reaksi (testubu) senilai Rp. 35.000,00
- Pembelian Jamur Metarizium 7 testube senilai Rp. 245.000,00
- Pembelian Jamur Trihoderma 7 testube senilai Rp. 245.000,00
- Pembelian Tabung Reaksi 7 testube senilai Rp. 245.000,00
- APH Metarizium Beauveria, Trichoderma senilai Rp. 735.000,00
- Pemesanan Tricho, Bb, Meta sebanyak 6 testube senilai Rp. 210.000,00
- Jamur Beauveria Sulawesi Barat senilai Rp. 175.000,00
- Pemesanan Mutu APH Trico dan Mutu APH Bb sebanyak 16 testube
Senilai Rp. 560.000,-
- Pemesanan Jamur APH Bb sebanyak 2 testube senilai Rp. 70.000,-
- Pemesanan Jamur APH Trico sebanyak 5 testube senilai Rp. 175.000,-

Pendapatan Lain – lain senilai Rp. 27.509.901,00 adalah terdiri dari :

- Penerimaan Kembali Belanj Barang TAYL senilai Rp. 4.000.000,00
- Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL senilai Rp. 4.149.973,00
- Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL senilai Rp. 479.850,00
- Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL senilai Rp. 5.275.600,00
- Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL senilai Rp. 13.600.000,00

Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya senilai Rp. 6.400.000,00

D.2 BEBAN PEGAWAI

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp8.493.219.416,00 dan Rp8.493.219.416,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Gaji Pokok PNS	6.130.771.500,00	6.135.591.680,00	-0,08
Beban Pembulatan Gaji PNS	75.754,00	80.987,00	-6,46
Beban Tunj. Anak PNS	94.558.490,00	102.704.822,00	-7,93
Beban Tunj. Beras PNS	285.841.740,00	301.960.300,00	-5,34
Beban Tunj. Fungsional PNS	368.960.000,00	384.140.000,00	-3,95
Beban Tunj. PPh PNS	19.943.682,00	63.620.709,00	-68,65
Beban Tunj. Struktural PNS	60.125.000,00	60.125.000,00	0,00
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	397.153.250,00	402.473.550,00	-1,32
Beban Tunjangan Umum PNS	169.285.000,00	175.695.000,00	-3,65
Beban Uang Lembur	21.406.000,00	91.572.000,00	-76,62
Beban Uang Makan PNS	945.099.000,00	859.532.000,00	9,96
Jumlah	8,493,219,416.00	8.577.496.048,00	-0,98

D.3 BEBAN BARANG DAN JASA

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp2,320,407,247.00 dan Rp.3.131.009.750,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	852,000.00	0.00	0.00
Beban Bahan	407,007,447.00	879,652,500.00	-53.73
Beban Barang Non Operasional Lainnya	205,544,000.00	692,899,200.00	-70.34
Beban Barang Operasional Lainnya	0.00	217,200,000.00	-100.00
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	127,680,000.00	101,743,500.00	25.49
Beban Honor Output Kegiatan	128,960,000.00	89,040,000.00	44.83
Beban Jasa Konsultan	440,900,000.00	0.00	0.00
Beban Jasa Lainnya	11,500,000.00	13,500,000.00	-14.82
Beban Jasa Profesi	9,900,000.00	20,700,000.00	-52.17
Beban Keperluan Perkantoran	579,137,500.00	582,292,000.00	-0.54
Beban Langganan Air	2,466,100.00	15,569,240.00	-84.16
Beban Langganan Listrik	225,828,800.00	318,215,410.00	-29.03
Beban Langganan Telepon	35,129,600.00	35,198,600.00	-0.20
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	102,200,000.00	119,999,300.00	-14.83
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	13,301,800.00	15,000,000.00	-11.32
Beban Sewa	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00
Jumlah	2,320,407,247.00	3,131,009,750.00	-25.89

D.4 BEBAN PEMELIHARAAN

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp446,939,950.00 dan Rp840,679,780.00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0.00	187,256,380.00	-100.00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	92,000,000.00	90,000,000.00	2.22
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	354,939,950.00	563,423,400.00	-37.00
Jumlah	446,939,950.00	840,679,780.00	-46.84

D.5 BEBAN PERJALANAN DINAS

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp,2.032.286.480,00 dan Rp.5.414.438.903,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Perjalanan Biasa	1,954,006,480.00	5,299,778,903.00	-63.13
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	5,280,000.00	76,160,000.00	-93.07
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	12,000,000.00	1,500,000.00	700.00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	61,000,000.00	37,000,000.00	64.87
Jumlah	2,032,286,480.00	5,414,438,903.00	-62.47

D.6 BEBAN BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT

Jumlah Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 30.000.000,00 dan Rp.1.102.692.000,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0,00	527.312.000,00	-100,00
Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0.00	426.642.000,00	-100,00
Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	30,000,000.00	148.738.000,00	-79,83
Jumlah	30,000,000.00	1,102,692,000.00	-9,28

D.7 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.2.215.253.022,00 dan Rp.2.407.581.504,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	395.437.154,00	289,118,070.00	36.77
Beban Penyusutan Jaringan	8.272.198,00	7,397,198.00	11.83
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.811.543.670,00	2,111,066,236.00	-14.19
Jumlah	2,215,253,022.00	2,407,581,504.00	-7.99

D.8 BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp0.00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tunjangan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0.00	0.00	0.00
Jumlah	0.00	0.00	0.00

D.9 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Kerugian Pelepasan Aset	-393,452,847.00	0.00	0.00
Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara (Masuk TP/TGR) Bendahara	0.00	46,701,250.00	-100.00
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	6,400,000.00	0.00	0.00
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	4,000,000.00	0.00	0.00
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	23,505,423.00	0.00	0.00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	4,478.00	8,281,123.00	-99.95
Jumlah	-359,542,946.00	54,982,373.00	-753.92

E PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 EKUITAS AWAL

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 19.148.017.433,00 dan Rp20,628,755,130.00.

E.2 SURPLUS/DEFISIT-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp-15,850,494,925.00 dan Rp-21,372,392,672.00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR

Tidak terdapat transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016.

E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp19.877.053.760,00 dan Rp10.091.761,00.

E.4.1 KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp1,160,941.00 dan Rp10,091,761.00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi per 31 Desember 2017.

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-360,00
Gedung dan Bangunan	1.951,00
Tanah	1.159.350,00
Jumlah	1.160.941,00

E.4.2 KOREKSI NILAI PERSEDIAAN

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

E.4.3 SELISIH REVALUASI ASET TETAP

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp19,875,892,819.00 dan Rp0.00. Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap per 31 Desember 2017.

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Tanah	15.065.558.650,00
Gedung dan Bangunan	4.652.990,189.00
Jumlah	19.875.892.819,00

E.5 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.14.390.137.056,00 dan Rp.21.743.187.568,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2017.

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	14,471,201,093.00
Diterima dari Entitas Lain	-81,064,037.00
Jumlah	14,390,137,056.00

E.5.1 DITERIMA DARI ENTITAS LAIN (DDEL)/DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2017 saldo DDEL adalah sebesar Rp-81.064.037,00 sedangkan DKEL sebesar Rp.14.471.201.093,00.

E.6 EKUITAS AKHIR

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 37.564.713.324,00 dan Rp. 20.628.755.130,00.

F PENGUNGKAPAN - PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN